

Hantu PKI dan Ujung Rekonsiliasi
(Analisis *Framing* Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan
Joko Widodo pada Majalah *Tempo* dan *Gatra*)

Meigitaria Sanita

Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB Universitas Islam Indonesia
Email: meigitariasanita@gmail.com

Puji Rianto

Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB Universitas Islam Indonesia
Email: puji.rianto@uii.ac.id

Abstrak

Isu PKI dan upaya rekonsiliasi di media massa setiap tahunnya menjadi isu kontroversial. Isu PKI menguat terutama pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Joko Widodo. Penelitian ini menjelaskan bagaimana *Tempo* dan *Gatra* dalam menanggapi isu PKI dan rekonsiliasi dalam dua pemerintahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert Entman. Penelitian ini menemukan bahwa artikel-artikel di *Tempo* cenderung menempatkan PKI sebagai korban, mendukung upaya rekonsiliasi, dan pentingnya pelurusan sejarah. Menurut *Tempo*, Orde Baru mempunyai peran besar dalam “menghantukan” PKI. *Gatra*, di sisi lain, cenderung berimbang dan memandang sejarah PKI sebagai traumatik sejarah bagi masyarakat. *Gatra* mendukung rekonsiliasi dilakukan secara alami, dan bahwa sejarah seyogianya dilakukan pemeriksaan ulang. Perbedaan kedua majalah karena dipengaruhi oleh ideologi, rutinitas organisasi, dan kekuatan ekstramedia.

Key words: PKI, Analisis Framing, Konstruksi, Rekonsiliasi

Abstract

The issue of PKI and the efforts of reconciliation rose by mass media every year become a controversial issue. This issue increased especially in the era of President Abdurrahman Wahid (Gus Dur) and Joko Widodo. This research explains how *Tempo* and *Gatra* constructed PKI and framed the reconciliation issues in this two presidency era. This research uses Robert Entman's model of framing analysis. The research found that articles in *Tempo* tend to place the PKI as a victim, support reconciliation efforts, and the importance of historical alignment. According to *Tempo*, the New Order had a major role in "shaking up" the PKI. *Gatra*, on the other hand, tends to be balanced and views the history of the PKI as historical traumatic for Indonesian peoples. *Gatra* supports reconciliation done naturally, and that history should be reexamined. The difference between the two magazines was influenced by ideology, organizational routine, and extra media power.

Keywords: PKI, Framing Analysis, Construction, Reconsiliatio

PENDAHULUAN

Dalam setiap masa pemerintahan, isu mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) hampir selalu muncul dan kontroversial. Pada waktu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, isu PKI menghangat karena dipicu oleh rencana Gus Dur mencabut TAP MPR No 25/1966 tentang PKI. Meskipun kebijakannya dinilai kontroversial dan terkesan membela PKI oleh berbagai pihak, tapi Gus Dur meyakini bahwa rencananya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Andy, 2011).

Pada era Presiden Joko Widodo, isu PKI kembali muncul karena keinginan forum '65 untuk melakukan diskusi pelurusan sejarah. Rencana tersebut ditentang oleh pihak anti komunis hingga muncul reaksi dari TNI AD untuk menginstruksikan memutar ulang film Pengkhianatan G30S yang berhenti tayang sejak 1998. Pemutaran ulang itu dilakukan untuk mengingatkan kembali pada masyarakat tentang sejarah pahit Bangsa Indonesia.

Isu mengenai PKI hampir selalu mengundang kontroversi. Bukan saja bahwa peristiwa itu telah menjadi penyebab terbunuhnya beberapa perwira Angkatan Darat, tetapi juga bahwa peristiwa '65 masih menyisakan banyak pertanyaan. Hingga saat ini, siapa yang berada di balik peristiwa '65 belum jelas. Versi resmi yang selama ini diyakini (terutama Angkatan Darat) menyatakan bahwa peristiwa itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), tapi versi ini tidak diterima sepenuhnya. Dalam *Historia*, Jurnal Pendidikan Sejarah No.1/2000 hal 62-71, Andi Suwarta, misalnya, menulis bahwa setidaknya ada empat versi "dalang" peristiwa 1965. Versi

pertama dikemukakan akademisi Universitas Cornell Amerika Serikat yang menyatakan bahwa peristiwa G30S 1965 adalah masalah internal AD, khususnya kelompok militer yang berasal dari divisi Diponegoro. *Kedua*, versi yang ditulis Antonie C.A. Dake yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalang utama peristiwa tersebut Presiden Soekarno sendiri. *Ketiga*, versi sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim, yang menyatakan bahwa dalang peristiwa tersebut adalah Jenderal Soeharto. *Keempat*, versi mantan intelijen Amerika Serikat, Peter Dale Scott, yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari upaya menjatuhkan Presiden Soekarno yang didalangi CIA.

Sebagai realitas sosial yang senantiasa mengundang kontroversi, isu PKI akan senantiasa menarik bagi media massa. Oleh karena itu, ketika isu PKI menguat karena beragam faktor, media tidak pernah lepas untuk menyiarkan isu tersebut. Baik media lokal maupun nasional, cetak maupun elektronik, tidak pernah luput dalam memberitakan isu PKI ketika muncul ke permukaan, tidak terkecuali majalah *Tempo* dan *Gatra*. Tentu saja, selayaknya media dalam mengkonstruksikan berita, realitas sosial tentang PKI itu pun muncul dalam 'versinya' yang beragam. Ini karena realitas media merupakan realitas hasil konstruksi, dan sebagai konstruksi realitas keberadaannya tidak pernah netral. Ada nilai, ideologi, dan bahkan kepentingan yang menyelimuti proses tersebut sehingga setiap media mempunyai 'versi' konstruksi realitasnya sendiri. Ini bisa dilihat dari bagaimana *Tempo* dan *Gatra* mengkonstruksikan realitas PKI dalam setiap berita dan artikel yang mereka tulis.

Pada edisi 16 April 2000, *Tempo* menulis dengan judul “PKI, Hantu atau dihantukan?” Dalam laporan tersebut, *Tempo* bersimpati kepada mantan PKI dan menegaskan bahwa keturunan mantan PKI menjadi korban diskriminasi dan penindasan pada era Orde Baru. Ketika media lain justru menganggap Gus Dur tidak kredibel dan negatif, *Tempo* bahkan seolah-olah memberi angin segar terhadap rencana Gus Dur yang kontroversial tersebut. Sementara itu, era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), “nada” *Tempo* tidak mengalami perubahan. Pada edisi 22 Mei 2016, *Tempo* mengangkat berita dengan judul “Fobia Hantu Komunisme” yang ditulis bersamaan dengan digelarnya simposium nasional “Membedah Tragedi 1965”. Sebelumnya, *Tempo* menurunkan liputan dengan judul, “Atribut PKI muncul Lagi, Cuma Gaya-Gayaan?”

Majalah berita *Gatra* mempunyai versi konstruksi yang berbeda dengan *Tempo*. Majalah *Gatra* pada edisi 8 April 2000 mengangkat berita dengan judul “Dagang Palu Arit.” Laporan tersebut berisi penolakan keras dari beberapa kalangan mengenai rencana kebijakan Gus Dur dalam pencabutan TAP MPRS No 25/1966. Penolakan keras dilakukan oleh demonstran dari Pergerakan Islam untuk tanah air dengan membakar bendera dengan simbol PKI di Istana Presiden. Penolakan yang dihimpun oleh *Gatra* berasal dari Kiai NU dan beberapa partai. Laporan tersebut menekankan ketidaktepatan kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur mengingat bahwa tugas pencabutan tersebut dianggap sebagai kewenangan MPR bukan presiden. Dari laporan penulisan tersebut, *Gatra* cenderung menitikberatkan pada ketidaksetujuan mengenai kebijakan tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana majalah *Tempo* dan *Gatra* mengkonstruksikan isu PKI pada kepemimpinan Presiden Gus Dur dan presiden Jokowi. Dengan menjawab pertanyaan penelitian ini, diharapkan bisa dilacak pengkonstruksian isu PKI di kedua majalah sehingga akan dipahami dengan baik bagaimana realitas yang sama pada akhirnya dikonstruksikan secara berbeda. Dengan begitu, kita akan lebih memahami bukan saja cara kerja media dalam mengkonstruksikan realitas, tapi juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut.

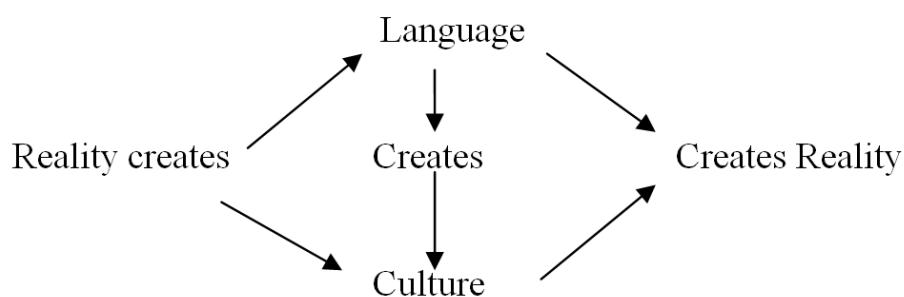
Realitas Partai Komunis Indonesia dan peristiwa 1965 bagaimanapun telah menyita perhatian publik, dan juga minat-minat ilmu sosial untuk mengkaji peristiwa tersebut. Dede Supriyatno dan Adolfo Eko Setyanto (2012), misalnya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, mengkaji citra militer pada peristiwa 1965 pada tingkatan teks dengan menggunakan metode analisis wacana Teun A. Van Dijk. Hasil studi tersebut menemukan bahwa citra militer saat itu sangat buruk karena militer dianggap kejam atas perannya sebagai fasilitator dan algojo pembantaian. Ini dibuktikan melalui tindakan menyebarkan propaganda negatif dan menciptakan mekanisme pembantaian mengenai pihak yang tertuduh menjadi anggota PKI. PKI dicitrakan sebagai kalangan yang harus disingkirkan dan meluasnya pandangan negatif masyarakat terhadap PKI muncul karena propaganda-propaganda yang dilakukan oleh militer.

Peter Berger dan Luckman dalam *The Social Construction of Reality* menyatakan bahwa pemahaman manusia terhadap sesuatu terjadi karena adanya komunikasi yang tercipta antara manusia

itu sendiri dengan yang lain karena proses sosial digambarkan melalui perilaku dan tindakan serta interaksi (Bungin, 2008: 13). Pada prinsipnya, konstruksi realitas merupakan konseptualisasi sebuah peristiwa ataupun keadaan yang berkaitan dengan politik. Faktanya pekerjaan media adalah menceritakan peristiwa sehingga kesibukan dari media tentu saja mengkonstruksi berbagai realitas yang

diliput dan kemudian disiarkan. Realitas yang dikonstruksi disusun hingga terbentuk sebuah cerita dan wacana bermakna (Hamad, 2004: 11). Dalam kaitan ini, bahasa menjadi unsur utama dalam proses konstruksi realitas karena bahasa menjadi sarana atau alat yang digunakan untuk menceritakan sebuah realitas (Hamad, 2004: 12).

**Berikut Hubungan Antara Bahasa, Realitas, dan Budaya
(Christian and Christian, 1996) (Hamad, 2004: 13)**

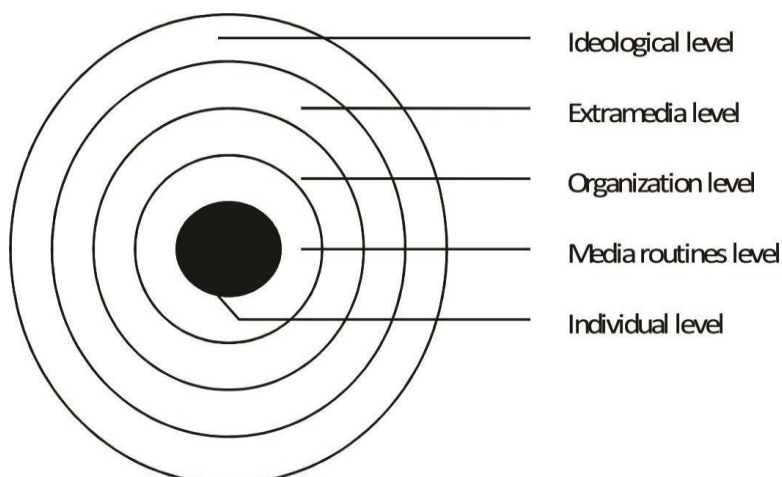


Shoemaker dan Reese memandang bahwa ideologi merupakan faktor yang memberikan pengaruh pada isi media karena ideologi sebagai mekanisme simbolik yang memiliki kekuatan mengikat masyarakat. Ideologi menekankan pada siapa yang memiliki kepentingan, dan bagaimana rutinitas organisasi media tersebut berjalan (Shoemaker dan Reese, 1996: 223). Dengan demikian, media merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan kelompok tertentu yang

memiliki kekuasaan dan kekuatan di lingkungan masyarakat (Shoemaker dan Reese, 1996: 229).

Konsep yang disampaikan Shoemaker dan Reese disebut dengan *Hierarchy of influence*. Konsep tersebut menjelaskan lapisan-lapisan yang mempengaruhi isi media. Gambarnya sebagai berikut (Shoemaker dan Reese, 1996: 223).

“Hierarchy Of Influence” Shoemaker & Reese



Media massa tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan kelompok yang berada dibelakangnya, terutama dalam hal transformasi isi informasi. Kepentingan yang menjadi acuan utama adalah ekonomi dan kekuasaan (Mahpuddin, 2009). Biasanya, media menggunakan suatu ‘*framing*’ tertentu untuk merepresentasikan nilai, ideologi, dan kepentingannya dalam mengkonstruksikan realitas berita. Baterson mengungkapkan bahwa *framing* merupakan struktur konseptual atau kepercayaan yang berfungsi untuk mengatur pandangan politik, kebijakan, wacana dimana terdapat standar kategori untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2002: 162).

Murray Edelman beranggapan bahwa *framing* sejajar dengan kategorisasi. Kategori atau pemakaian perspektif tertentu menandakan bagaimana fakta dan realitas dipahami (Eriyanto, 2012: 186-187). Kategori dalam konteks pandangan Edelman adalah abstraksi dan fungsi pikiran sehingga kategori yang dilakukan dapat membantu manusia untuk memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan menjadi realitas yang bermakna. Dalam perspektif

sosiologis Goffman (Sobur, 2002: 163), analisis *framing* merupakan kebiasaan mengklasifikasi, mengatur serta memaknai, mengelompokkan pengalaman-pengalaman untuk dipahami, sedangkan dalam aspek psikologi *framing* dapat diketahui dari peletakan informasi yang unik sehingga elemen yang diseleksi menjadi penting dan berpengaruh pada individu untuk mengambil kesimpulan.

Pan dan Kosicki lebih jauh mengemukakan bahwa *framing* merupakan strategi dalam mengkonstruksi berita dengan menggunakan perangkat kognisi untuk mengkode informasi, mengartikan peristiwa yang dihubungkan dengan rutinitas pembentukan berita. Hampir sama dengan Goffman, Pan dan Kosicki menyatakan terdapat dua konsep utama pada *framing*, yaitu konsep psikologi dan sosiologi. Konsep psikologi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang menerima, memproses serta mengolah informasi yang ditunjukkan dalam skema tertentu, sedangkan dalam konsep sosiologi adalah bagaimana seseorang mengartikan dengan cara pandangnya, mengklasifikasikan, mengorganisasi berdasarkan pengalaman sosial untuk mengerti dirinya dan realitas yang

ada diluar dirinya (Lihat Eriyanto, 2012: 252-253).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah berita yang berkaitan dengan PKI pada majalah *Tempo* dan majalah *Gatra* yang dibagi menjadi dua, yaitu periode masa kepemimpinan Presiden Gus Dur terhitung dari terbitan tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pemerintahan Presiden Jokowi, terhitung dari terbitan edisi 20 Oktober 2014 hingga Oktober 2017. Dari banyaknya pemberitaan isu PKI pada kedua era kepresidenan tersebut, dipilih isu yang berpengaruh terutama terhadap politik pemerintahan. Pemberitaan yang terbit sepanjang bulan April 2000 mengenai usulan Gus Dur untuk

mencabut TAP MPRS No 25/1966, dan pemberitaan yang terbit pada bulan Oktober 2017 pada era Joko Widodo, yaitu aksi pembubaran diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 oleh forum '65 yang akhirnya muncul reaksi dari TNI AD untuk memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI. Kedua isu ini cukup besar karena menyulut reaksi dari elemen-elemen pemerintahan dan negara. Media karenanya akan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kedua isu tersebut.

Analisis akan dilakukan dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Dalam model ini, terdapat dua dimensi penting, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek.

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (include), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (exclude). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dari kedua dimensi tersebut, analisis framing model Entman mengacu pada empat hal, yaitu pemberian definisi, sumber masalah, serta evaluasi dan

rekomendasi suatu wacana dan menekankan kerangka berpikir terhadap suatu peristiwa serta membuat keputusan moral.

Konsep Framing Robert N. Entman

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tempo dan *Gatra* telah menampilkan beberapa pemberitaan mengenai PKI pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu PKI hampir setiap tahun selalu menghiasi media massa seolah menjadi pemberitaan yang tidak ada habisnya. Ini membuktikan sifat kontroversial isu komunisme di Indonesia, dan senantiasa membuka perspektif berbeda dalam masyarakat, tidak terkecuali *Tempo* dan *Gatra*.

1. PERBANDINGAN *FRAMING TEMPO* DAN *GATRA*

Isu PKI adalah suatu peristiwa, realitas sosial, tapi menjadi berbeda ketika

media mengangkat realitas tersebut. Fakta yang serupa akan berbeda ketika diekspos oleh media (Bimo Nugrogo dkk, 1999: 200). Perbedaan dalam memandang fakta PKI terjadi karena sudut pandang dan ideologi wartawan mempengaruhi apa yang diliput dan mana yang tidak diliput. Ini membuat fakta yang disajikan berbeda. Ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian tertentu yang 'ditenggelamkan' sehingga menentukan bentuk fakta yang diterima publik.

Berdasarkan pembahasan *frame Tempo* dan *Gatra* dalam pemberitaan isu PKI era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Joko Widodo, muncul pemaknaan yang berbeda (lihat tabel 1).

TABEL 1

PERBEDAAN *FRAME TEMPO* DENGAN *GATRA*

Elemen	<i>Tempo</i>	<i>Gatra</i>
<i>Define Problem</i>	Ideologi komunisme tidak sesuai dengan jaman	Komunisme menjadi traumatik sejarah
<i>Diagnose Cause</i>	Orde Baru dan TNI AD	Sejarah PKI
<i>Moral Judgement</i>	Isu PKI sebagai alat untuk menyerang presiden Pelanggaran HAM	Isu PKI melemahkan presiden Alat mobilisasi politik
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekonsiliasi Pelurusan sejarah	Rekonsiliasi alami Pemeriksaan ulang sejarah

Define problem. *Tempo* melihat bahwa komunisme sebagai ideologi yang dianggap sudah tidak selayaknya diperdebatkan karena beberapa fakta, diantaranya pelarangan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena ideologi komunis sudah tidak laku lagi. *Tempo* konsisten dalam memandang isu PKI. Ini bukan berarti *Tempo* membela keberadaan PKI, tapi *Tempo* menempatkan PKI khususnya keluarga mantan PKI dan mantan anggota PKI yang ditindas dalam kerangka Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, *Tempo* mengkonstruksikan PKI bukan lagi ancaman bagi bangsa, melainkan korban yang harus dibantu mendapatkan hak. Implikasinya terhadap pemberitaan, *Tempo* lebih memilih *frame* bahwa melarang ideologi komunisme bukan tindakan yang perlu dilakukan.

Melihat latar belakang *Tempo* yang didirikan oleh Goenawan Mohamad dan kawan-kawan yang *notabene* adalah aktivis di masa itu maka pilihan *frame Tempo* bisa dipahami. Pemikiran-pemikiran Goenawan Mohamad yang begitu mendukung kebebasan dituangkan pada bukunya yang berjudul “*Marxisme Seni Pembebasan.*” Dalam buku tersebut, Goenawan Mohamad mengemukakan bahwa sejarah manifestasi kebudayaan

pada saat itu menolak disandingkan dengan persamaan filosofi marxisme yang juga menginginkan kebebasan manusia atas sistem kapitalis.

Berbeda dengan *Tempo*, *frame* yang ditonjolkan *Gatra* lebih mengarah pada bagaimana sejarah PKI menjadi sebuah trauma mendalam masyarakat Indonesia. Penggambaran demikian merupakan cara *Gatra* untuk tidak memihak keduanya. Fakta-fakta yang dipilih untuk disampaikan kepada publik ingin menunjukkan bahwa *Gatra* tidak ingin memihak kepada pihak-pihak tertentu. Cara tersebut merupakan cara yang “cukup aman” diterima oleh publik mengingat isu ini masih sensitif dan kontroversial. Menggambarkan isu PKI sebagai korban ataupun *biang kerok* bukan pilihan yang tepat, dan akan membuat persoalan tidak kunjung selesai sehingga cara yang seperti itulah dipilih *Gatra* (Karni, wawancara, 22 Desember 2017).

Jika liputan tersebut disandingkan dengan ideologi, maka sudah sesuai nilai *Gatra*, yakni menjadi media yang kritis, tapi tidak mengiris, tajam tapi tidak memihak. Artinya, tetap peka terhadap suatu fenomena dan mengambil keputusan secara tepat agar tidak merugikan pihak tertentu (Karni, wawancara, 22 Desember

2017). Selain itu, melihat latar belakang pendirian *Gatra* akibat pembredelan *Tempo* karena dianggap mengganggu stabilitas ketahanan nasional oleh Orde Baru, maka menjadi bisa diterima jika (Steele, 2007) pemberitaan *Gatra* berusaha menghindari cara-cara yang menyulut permasalahan dan bertindak secara berimbang (Karni, Wawancara, 22 Desember 2017).

Diagnose cause. Orde Baru dan TNI AD disebut *Tempo* sebagai pihak yang memberi pengaruh kepada masyarakat untuk tetap merasa takut terhadap komunisme. *Tempo* menyebutkan berbagai fakta dalam setiap berita mulai dari era kepresidenan Gus Dur dan Jokowi bahwa Orde Baru-lah yang telah mengawetkan “hantu PKI.” Orde Baru diposisikan *Tempo* sebagai rezim yang selalu ingin meneguhkan kekuasaannya, dan TNI AD sebagai pihak yang melaksanakan strategi Orde Baru. Secara tegas, *Tempo* memosisikan Orde Baru sebagai pihak yang semestinya disalahkan karena telah memberikan doktrin yang begitu kuat kepada masyarakat Indonesia mengenai PKI melalui propaganda dan berbagai ancaman.

Berbeda dengan *Tempo*, yang lebih ditonjolkan *Gatra* dari berbagai pemberitaan adalah sejarah PKI itu sendiri. Berita *Gatra* lebih menekankan pada sejarah PKI yang melakukan pemberontakan hingga akhirnya menimbulkan trauma di masyarakat. *Gatra* berusaha agar paparan beritanya lebih bisa diterima semua pihak. Ini dilakukan, misalnya, dengan tidak serta merta memberikan argumennya sendiri, melainkan pemaparan fakta. Pemilihan fakta juga tidak serta merta ditulis dengan justifikasi sehingga mengesankan posisi

Gatra yang sangat abu-abu dalam mengkonstruksi isu PKI.

Sikap *Gatra* yang demikian memang disadari oleh Asrori redaktur *Gatra* bahwa sesuai dengan ideologi yang ingin mereka sampaikan kepada publik bahwa berita harus seimbang. Aditya, wartawan *Gatra*, juga mengakui bahwa berita yang ditulis oleh *Gatra* tidak terlalu berani seperti *Tempo* yang memperlihatkan keberpihakannya dalam mengambil sikap (Wawancara, 22 Desember 2017). Namun, Asrori memberikan argumen mengenai perbedaan antara *Tempo* dan *Gatra* dalam menentukan sikap. *Gatra* ingin menjalankan fungsi pers yang mengedukasi dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan argument tersebut jelas bahwa *Gatra* ingin bersikap lebih seimbang walaupun pada dasarnya pers tetap harus berpihak.

Moral judgement. Kemunculan isu PKI dinilai sebagai indikasi fenomena tertentu. Selain sebagai masalah politik, ada hal lain yang juga disoroti oleh media. *Tempo* menyebutkan bahwa isu PKI untuk menyerang presiden dan pelanggaran HAM. Dalam hal penyerangan presiden karena menyambut pemilu 2019 dan saling berebut kekuasaan, sama halnya ada era keresidenan Gus Dur yang menyerang usulan Gus Dur sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap presiden yang menjabat. Posisi pemerintah selalu salah jika dihadapkan pada persoalan PKI. Abdul Manan wartawan senior *Tempo* menjelaskan bahwa sikap pemerintah yang terkesan ambigu terhadap komunisme merupakan hal dilematik karena isu tersebut tidak populer untuk pemerintah. Alasannya, pada satu sisi, hal ini akan berseberangan dengan tentara serta kelompok Islam, tapi, di sisi lain,

berhadapan dengan hak asasi manusia (Wawancara, 22 Desember 2017). Sikap seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyerang presiden atas nama isu PKI.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia, *Tempo* menilai bahwa penindasan terhadap PKI yang dilakukan Orde Baru demi kekuasaan politik telah menyalahi aturan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, *Tempo* selalu ingin memberitahu kepada publik bahwa fenomena yang telah terjadi adalah pelanggaran HAM. Hal tersebut ditunjukkan oleh *Tempo* dengan memberikan fakta mengenai keterlibatan elemen di luar PKI khususnya TNI AD dalam pemberitaan yang dituliskan. Salah satunya mengenai film “*Pengkhianatan G30S PKI*” yang disebutkan sebagai manipulasi sejarah dan pesanan Orde Baru. *Tempo* ingin menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Ini dilakukan berdasarkan pandangan ideologis bahwa *Tempo* berdiri atas dasar demokrasi, hak asasi, dan demokrasi.

Gatra, di sisi lain, menilai bahwa pemberitaan PKI sebagai upaya melemahkan presiden serta mobilisasi politik. Hampir sama dengan *Tempo*, *Gatra* juga menyebutkan bahwa isu PKI dinilai untuk melemahkan presiden yang tengah memimpin negara. Dengan menyampaikan protes masyarakat mengenai usulan Gus Dur, usulan pencabutan TAP MPRS diletakkan dalam kerangka keadaan ekonomi kurang baik, dan mestinya Gus Dur melakukan tindakan yang perlu dilakukan (Karni, wawancara, 22 Desember 2017). Gus Dur pun pun dilemahkan oleh berbagai partai politik bahkan dari pihak NU sendiri.

Mengenai mobilisasi politik, *Gatra* memberikan *frame* bahwa di balik pemutaran film yang dilakukan TNI AD pada era kepresidenan Jokowi mendapat dukungan dari berbagai partai politik. Dalam hal ini, *Gatra* tidak memberikan penilaian yang buruk terhadap tindakan Partai Politik dan pihak TNI AD. Fakta yang dipaparkan *Gatra* lebih mengarah pada keseimbangan berita dengan menunjukkan pihak-pihak sumber berita yang ditampilkan untuk mendukung aksi tersebut.

Treatment recommendation. Solusi mengenai isu PKI yang tak kunjung selesai membuat PKI semakin menjadi masalah yang selalu muncul setiap tahun, adanya desakan dari keluarga korban hingga pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. *Tempo* memberikan tawaran solusi bahwa harus dilakukan rekonsiliasi dan pelurusan sejarah. Sesuai dengan dasar berdirinya *Tempo* yang membela kaum tertindas dan hak asasi manusia, *Tempo* sejak awal telah memposisikan PKI sebagai korban atas ketidakadilan rezim Orde Baru sehingga harus dibela. Upaya rekonsiliasi harus dilakukan oleh Negara. Hal ini selalu disebutkan *Tempo* sebagai penutup berita yang disampaikan kepada publik. Selanjutnya, pelurusan sejarah mengenai peristiwa ‘65 perlu dilakukan.

Tempo menunjukkan sensitivitas terhadap rezim Orde Baru mengingat bahwa sejarah yang berkembang adalah bersumber dari Orde Baru demi melanggengkan kekuasaan. Pelurusan sejarah yang disarankan oleh *Tempo* adalah dengan mendukung diskusi-diskusi yang memberikan perspektif baru serta meyakini bahwa apa yang telah dipropagandakan Orde Baru tidak benar. Di sini, *Tempo* juga menekankan bahwa

kejadian masa lalu mengenai PKI harus segera diselesaikan karena hukum juga memiliki sisi kemanusiaan bukan malah menyalahi hak asasi manusia (Bagja, wawancara, 22 Desember 2017).

Berbeda dengan *Tempo*, *Gatra* menuliskan bahwa yang seharusnya dilakukan adalah rekonsiliasi alami dan pemeriksaan ulang sejarah. Rekonsiliasi alami yang dimaksud adalah dengan kerelaan dari setiap pihak bukan memaksa Negara meminta maaf kepada PKI. Di sini, *Gatra* menempatkan diri untuk tidak bersikap membela salah satu pihak, tapi memaparkan sesuai perspektif yang dianggap perlu disampaikan kepada publik. Seperti disampaikan oleh Asrosi, Redaktur *Gatra*, menempatkan PKI sebagai korban akan menimbulkan kemarahan bagi umat Islam, dan mengatakan PKI sebagai pihak yang harus disalahkan juga kurang tepat (wawancara, 22 Desember 2017). Oleh karena itu, *Gatra* memilih untuk menawarkan solusi yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak.

Pemeriksaan ulang sejarah dipilih oleh *Gatra* sebagai rekomendasi. Pemilihan kata “periksa” bukan berarti menyalahkan sejarah yang telah ada, tapi mengkonfirmasi ulang mengingat sejarah yang tengah berkembang pada masyarakat Indonesia sebagian besar adalah sejarah yang dibentuk dan dikonstruksi oleh Orde Baru. Di sini, *Gatra* cukup berhati-hati dan sebisa mungkin memberikan solusi berimbang.

2. Diskusi Teoritik

Perbandingan *frame* antara *Tempo* dengan *Gatra* disebabkan oleh berbagai faktor, yang mencakup latar belakang serta ideologi media. Namun, dalam beberapa

hal, terdapat kemiripan meskipun berbeda dalam pemaparan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan pada poin sebelumnya. Pada poin sebelumnya dijelaskan bahwa latar belakang media begitu kuat mempengaruhi sikap suatu media dalam memandang sebuah fenomena.

Perbedaan pemaparan berita yang dilakukan antara *Tempo* dengan *Gatra* merupakan hasil konstruksi dari masing-masing media. Sesuai dengan paradigma penelitian yang mendasari penelitian ini, yaitu konstruktivisme dan berkaitan dengan konsep *hierarchy of influence* yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese, maka perbedaan *Tempo* dan *Gatra* dalam mengkonstruksikan isu sekitar PKI pada era Gus Dur dan Jokowi kiranya bisa diterima.

Tempo mengkonstruksi berita PKI sebagai sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru sehingga sikap yang ditunjukkan *Tempo* adalah berpihak pada mantan keluarga PKI dan mantan anggota PKI. *Tempo* karenanya selalu mendukung upaya rekonsiliasi dan mendesak pemerintah untuk melakukan pelurusan sejarah. Implikasi dari hal tersebut terlihat dari kalimat-kalimat yang dipilih *Tempo* untuk menegaskan bahwa PKI sebagai korban dan beberapa pihak sengaja memanfaatkan berita tersebut untuk kepentingan kelompok. Dalam paradigma konstruktivisme, realitas adalah sesuatu yang bersifat subjektif, ganda bahkan plural (Krisdianto, 2014). *Tempo* tidak mengacu bahwa kebenaran peristiwa G30S 1965 seperti yang telah dipropagandakan oleh rezim Orde Baru, melainkan ada fakta-fakta lain yang perlu diungkap. Tentu saja, dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi isi berita dan cukup terlihat pada konstruksi yang dilakukan

Tempo adalah faktor individual, rutinitas media, organisasi, ekstramedia dan ideologi.

Dimulai dari level individu, *Tempo* telah memberikan kualifikasi khusus siapa yang dapat bergabung dengan *Tempo*. Seperti dijelaskan pada buku *Wars Within*, wartawan yang bekerja pada majalah *Tempo* adalah mereka yang belum pernah memiliki pengalaman bekerja pada media lain sehingga pengetahuan yang akan dibangun oleh organisasi lebih mudah. Ini semacam “hegemoni” yang ditanamkan bagaimana seorang wartawan akan bekerja dan sesuai dengan jurnalistik versi *Tempo*. Sesuai dengan paradigma konstruktivisme, posisi wartawan adalah sebagai agen konstruksi dan mendefinisikan suatu fenomena yang telah ditentukan sisi mana yang akan ditonjolkan kepada publik. Dalam isu PKI di kedua pemerintahan, *Tempo* menonjolkan sisi bahwa PKI adalah korban yang harus dibantu untuk memperoleh haknya. Rutinitas *Tempo* yang selalu mengadakan rapat untuk menentukan *angle* berita memberikan kontribusi bagi “arah” konstruksi realitas PKI dalam majalah *Tempo*. Nampaknya, faktor ekstramedia kurang begitu mempengaruhi berita yang dihasilkan *Tempo*. Sebaliknya, ideologi dan rutinitas serta organisasi media-lah yang lebih berpengaruh dalam mengkonstruksikan realitas. Penggunaan kalimat yang cenderung tegas mengenai isu PKI yang digunakan sebagai alat untuk menyerang presiden seringkali digunakan *Tempo* sebagai wujud konstruksi *Tempo* yang tidak menyetujui fakta yang telah dibangun Orde Baru bahwa PKI adalah dalang satu-satunya dan selalu sebagai pihak yang paling disalahkan.

Berbeda dengan *Tempo*, *Gatra* lebih sering mengkonstruksikan PKI

sebagai sesuatu yang memang sensitif bagi masyarakat. Di sini, *Gatra* lebih berhati-hati dalam menuliskan berita PKI di kedua pemerintahan. Pandangan *Gatra* mengenai isu PKI adalah peristiwa yang menyebabkan traumatik pada masyarakat. Untuk itu, yang dilakukan *Gatra* adalah tidak mendukung rekonsiliasi dan juga tidak melarang rekonsiliasi. Posisi *Gatra* berada di tengah-tengah, yaitu hanya memaparkan fakta. Sama halnya dengan *Tempo*, sikap *Gatra* juga dipengaruhi oleh faktor individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia, dan ideologi media.

Wartawan *Gatra* sebagai agen pencari informasi dan mengkonstruksikan realitas banyak dipengaruhi oleh rutinitas media. Seperti dikemukakan Aditya, wartawan *Gatra*, proses pencarian informasi berfokus pada *angle* yang telah ditentukan dan disepakati oleh forum. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Asrori, Redaktur *Gatra*, yang membenarkan bahwa seluruh pemilihan *angle* merupakan keputusan bersama, dan hal tersebut harus dijalankan oleh seluruh wartawan. Kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh organisasi media dimana keputusan tetap berada pada posisi tertinggi, yakni editor atau redaktur pelaksana *Gatra*.

Mengenai ketidakberpihakan *Gatra* dalam mem-*framing* pemberitaan PKI juga dipengaruhi oleh faktor ekstra media, terutama TNI, kelompok Islam, dan PKI itu sendiri. *Gatra* menempatkan posisi Angkatan Darat sebagai pihak yang menjaga keamanan Indonesia bukan sebagai pendukung Orde Baru yang melanggar hak para mantan keluarga PKI dan mantan anggota PKI. Pandangan *Gatra* bahwa semua pihak bisa menerima berita PKI menciptakan ‘ruang abu-abu’ dalam mengkonstruksikan peristiwa

tersebut. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan ekstramedia mempengaruhi bagaimana pada akhirnya realitas tentang PKI dikonstruksikan. Dengan kata lain, berita yang dihasilkan *Gatra* merupakan konstruksi yang telah dikemas senetral mungkin agar diterima publik dan menenangkan bagi semua pihak. Oleh sebab itu, sikap yang ditunjukkan *Gatra* dalam memandang isu PKI selalu memberi opsi rekonsiliasi alami tanpa memaksa salah satu pihak namun melalui kesadaran bersama.

PENUTUP

Kesimpulan yang bisa dirumuskan dari kajian ini bahwa ada beberapa aspek yang ditonjolkan *Tempo* mengenai pemberitaan PKI era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi. Penonjolan berita yang disampaikan *Tempo* cenderung karena dasar ideologi *Tempo* yang memihak pada hak asasi manusia, pengalaman sejarah awal berdiri *Tempo*, hingga para pendiri *Tempo* Goenawan Mohamad dan kawan-kawan. Sejarah telah membawa *Tempo* memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rezim Orde baru sehingga memilih dan mengambil sikap memposisikan PKI sebagai korban yang harus mendapatkan haknya. Terdapat empat penonjolan yang telah peneliti rangkum diantaranya adalah pelarangan ideologi komunisme tidak

relevan dengan zaman, kemunculan isu komunisme digunakan untuk menyerang presiden, Orde Baru dan TNI AD aktor yang menyebabkan masyarakat takut dengan isu PKI, pelanggaran HAM, dan perlunya rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah. Konstruksi tersebut didominasi oleh pengaruh ideologi dan organisasi.

Sama halnya dengan *Tempo*, pemberitaan *Gatra* juga dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya *Gatra* serta ideologi yang mempengaruhi. Mengingat latar belakang *Gatra* yang didirikan karena pembredelan *Tempo* oleh Rezim Orde Baru serta anggota yang bergabung di tubuh *Gatra* berasal dari mantan anggota *Tempo*. Hal tersebut berpengaruh terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh *Gatra* terhadap isu PKI di era kepresidenan Gus Dur dan Jokowi. Empat penonjolan yang disampaikan *Gatra* antara lain pembebasan ideologi komunisme perlu dipertimbangkan karena traumatik sejarah, dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa, isu komunisme sebagai alat untuk dari melemahkan pemerintah dan mobilisasi politik, TNI AD sebagai pelindung negara dari bahaya komunisme, rekonsiliasi alami dan pemeriksaan ulang sejarah. Konstruksi tersebut didominasi oleh pengaruh ideologi, ekstramedia, dan organisasi.

DAFTAR USTAKA

- Andy, Tim Penulis Kick. (2011). *Kumpulan Kisah Inspiratif 2*. Yogyakarta: Bentang.
- Bungin, Burhan. (2008). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Eryanto. (2002) *Analisis Framing :Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta : Granit.
- Krisdinanto, N (2014). *KOMUNIKATIF*, Jurnal Ilmiah Komunikasi/Volume 3/Nomor 01 Juli 2014
- Mahpuddin. (2009). *Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil*. Jurnal *Academica Untad*. Vol 1, No 2. <http://download.portalgaruda.org/article.php> 191. (Akses pada 1 Juni 2017. Pukul 15.30 WIB).
- Mohamad, Goenawan. 2011. *Marxisme Seni Pembebasan*. Jakarta: TEMPO dan Grafiti Pers
- Nugroho, Bimo dkk. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Yogyakarta: LKiS.
- Sobur, Alex. (2006). *Analisis Teks Media: suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shoemaker dan Reese.(1996). *Mediating The Message: Theories Of Influence On Mass Media Content*. New York: Longman Publisher.
- Steele, Janet. (2007). *Wars Within*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Suwirta, Andi (2000). *Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana sejarah Orde Baru dalam Sorotan, Jurnal Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.1
- Supriyatno, Dede dan Adolfo Eko Setyanto, (2012) “Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012)” *Ilmu Komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Wawancara

- Aditya Kirana. *Wartawan Gatra, Jakarta. 22 Desember 2017*
- Abdul Manan. *Wartawan Tempo. Jakarta. 22 Desember 2017*
- Asrori S Karni. *Redaktur Pelaksana Gatra. Jakarta. 22 Desember 2017.*
- Bagja Hidayat. *Redaktur Pelaksana Tempo. Jakarta. 22 Desember 2017*